

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN  
PMI BERMASALAH (PERLEVA) DI UPTP2TK JAWA TIMUR**

**Raga Cahya Putra**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[ragacahyaputra@gmail.com](mailto:ragacahyaputra@gmail.com)

**Supri Hartono**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[suprihartono@untag-sby.ac.id](mailto:suprihartono@untag-sby.ac.id)

**Hasan Ismail**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[hasanismail@untag-sby.ac.id](mailto:hasanismail@untag-sby.ac.id)

**ABSTRACT**

East Java is the province with the highest number of Indonesian Migrant Workers (IMW) placements in Indonesia, while also recording a substantial number of complaints totaling 190 cases in 2024. This situation places UPTP2TK East Java in a strategic position as the implementer of the PERLEVA Program (Empowerment and Protection of Problematic Indonesian Migrant Workers). This study aims to describe the implementation of the PERLEVA Program at UPTP2TK East Java and to identify its supporting and inhibiting factors. A descriptive qualitative method was employed using Winter's Policy Implementation Model (2012), which encompasses three dimensions: inter-organizational behavior, street-level bureaucratic behavior, and target group behavior. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings reveal that PERLEVA implementation runs fairly effectively, supported by a strong regulatory framework (Law No. 18 of 2017, East Java Regional Regulation No. 2 of 2022, and Governor Regulation No. 62 of 2018), high commitment from implementers who are willing to provide 24-hour services, and positive responses from the target group. Inhibiting factors include limited human resources in the PERLEVA Section, a training gap between civil servants and non-civil servants, budget constraints for emergency cases, and varying levels of administrative capability among IMW families. The study concludes that the success of PERLEVA implementation highly depends on the commitment of field-level implementers who are able to compensate for existing structural limitations.

**Keywords:** *Policy Implementation, PERLEVA, Indonesian Migrant Workers, UPTP2TK East Java, Winter's Model*

### **ABSTRAK**

Jawa Timur merupakan provinsi penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di Indonesia, sekaligus mencatatkan angka pengaduan PMI yang cukup tinggi dengan 190 kasus pada tahun 2024. Kondisi ini menempatkan UPTP2TK Jawa Timur pada posisi strategis sebagai pelaksana Program PERLEVA (Pemberdayaan dan Perlindungan PMI Bermasalah). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Program PERLEVA di UPTP2TK Jawa Timur serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Model Implementasi Kebijakan Winter (2012) yang mencakup tiga dimensi, yaitu perilaku hubungan antar organisasi, perilaku birokrasi garis depan, dan perilaku kelompok sasaran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERLEVA berjalan cukup efektif ditopang oleh kerangka regulasi yang kuat (UU No. 18 Tahun 2017, Perda Jawa Timur No. 2 Tahun 2022, dan Pergub No. 62 Tahun 2018), komitmen tinggi pelaksana yang bersedia melayani 24 jam, serta respons positif dari kelompok sasaran. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia pada Seksi PERLEVA, kesenjangan pelatihan antara ASN dan non-ASN, keterbatasan anggaran untuk kasus darurat, serta variasi kemampuan administrasi keluarga PMI. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi PERLEVA sangat bergantung pada komitmen pelaksana lapangan yang mampu mengompensasi keterbatasan struktural yang ada.

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan, PERLEVA, Pekerja Migran Indonesia, UPTP2TK Jawa Timur, Model Winter*

#### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah PMI pada tahun 2024 mencapai 296.970 orang, meningkat 8,40% dibandingkan tahun 2023. Dari seluruh provinsi di Indonesia, Jawa Timur secara konsisten menempati posisi tertinggi sebagai daerah asal PMI, menyumbang sekitar 64% bersama Jawa Barat dan Jawa Tengah dari total penempatan PMI nasional (Nabilah, 2025). Tingginya angka penempatan PMI dari Jawa Timur tidak terlepas dari persoalan struktural yang mendorongnya. Tingkat pengangguran Indonesia tercatat 5,2 persen berdasarkan laporan World Economic Outlook IMF April 2024, melampaui Filipina, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand. Keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri mendorong masyarakat mencari peluang di luar negeri, terutama di negara-negara seperti Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura yang menawarkan upah jauh lebih tinggi.

Namun demikian, fenomena migrasi kerja ini tidak berjalan tanpa risiko. Data BP2MI mencatat bahwa pada periode Januari–Mei 2025 terdapat 948 kasus pengaduan PMI, dengan kategori tertinggi berupa PMI ingin dipulangkan (301 kasus), PMI gagal berangkat (116 kasus), dan PMI meninggal (62 kasus). Jawa Timur sendiri mencatatkan 190 kasus pengaduan sepanjang tahun 2024,

menempatkannya di posisi ketiga secara nasional setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sebagai respons atas permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menjadi landasan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPTP2TK) di setiap provinsi. Di Jawa Timur, UPTP2TK menjalankan Program PERLEVA (Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pekerja Migran Bermasalah) yang memberikan layanan terpadu mulai dari pengaduan, mediasi, fasilitasi pemulangan, penyediaan shelter, pendampingan klaim BPJS, penanganan jenazah, hingga program pemberdayaan PMI purna.

Kajian terdahulu tentang perlindungan PMI di Jawa Timur lebih banyak berfokus pada inovasi layanan berbasis teknologi seperti simPADU-PMI (Salsabila & Nawangsari, 2019; Triprastiwi & Niswah, 2020), efektivitas layanan repatriasi (Gunawan & Nafi'ah, 2025), serta analisis hukum normatif (Izzati, 2019). Kajian mendalam tentang implementasi program PERLEVA di tingkat pelaksana teknis daerah masih sangat terbatas, sehingga terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi. Penelitian ini hadir untuk menjawab celah tersebut dengan menganalisis implementasi PERLEVA menggunakan Model Implementasi Kebijakan Winter (2012) yang menekankan interaksi antara pelaksana, struktur organisasi, dan kelompok sasaran sebagai penentu utama efektivitas implementasi kebijakan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam dalam konteks alaminya (Fadli, 2021). Pendekatan kualitatif dipilih karena implementasi kebijakan merupakan proses sosial yang kompleks, memerlukan eksplorasi mendalam atas makna, interaksi, dan dinamika yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap melalui data kuantitatif semata. Lokasi penelitian adalah UPTP2TK Jawa Timur yang berkedudukan di Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya, di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada posisi strategis UPTP2TK sebagai pelaksana teknis Program PERLEVA sekaligus garda terdepan perlindungan PMI bermasalah di Jawa Timur.

Fokus penelitian diarahkan pada implementasi Program PERLEVA melalui tiga dimensi utama Model Winter (2012), yaitu: (1) perilaku hubungan antar organisasi (*behavior relationships between organizations*), mencakup koordinasi, komunikasi, dan komitmen lintas instansi; (2) perilaku birokrasi garis depan (*street-level bureaucratic behavior*), mencakup kapasitas, motivasi, dan diskresi pelaksana lapangan; serta (3) perilaku kelompok sasaran (*target group behavior*), mencakup pemahaman, partisipasi, dan respons PMI beserta keluarganya. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria keterlibatan langsung dalam pelaksanaan atau penerimaan layanan Program PERLEVA. Informan terdiri dari empat narasumber, yaitu: Pak Prayit (pejabat struktural setara kepala seksi), Bu Defrina (Pengantar Kerja Ahli Pertama/pelaksana lapangan), Bu Nurul (Kepala Seksi PERLEVA), dan Bu Wiwin Sukaningsih (keluarga PMI sebagai penerima manfaat). Wawancara dilaksanakan pada 2 Desember 2025.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi langsung ke lokasi pelayanan UPTP2TK, serta telaah dokumentasi berupa regulasi, laporan kegiatan, dan data kasus PMI. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program PERLEVA (Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pekerja Migran Bermasalah) merupakan program unggulan UPTP2TK Jawa Timur yang berlandaskan pada UU No. 18 Tahun 2017, Peraturan Daerah Jawa Timur No. 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Peraturan Gubernur No. 62 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi UPTP2TK. Program ini dijalankan oleh Seksi Perlindungan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Penempatan yang berada di bawah Kepala UPTP2TK.

Cakupan layanan PERLEVA sangat luas, meliputi penanganan pengaduan PMI dan keluarganya, mediasi antara PMI dengan perusahaan penempatan (P3MI) pada kasus gaji tidak dibayar, kekerasan, atau pelanggaran kontrak, fasilitasi pemulangan bagi PMI sakit, deportasi, atau gagal berangkat, fasilitasi penanganan jenazah PMI mulai dari penjemputan di Bandara Juanda hingga pengantaran ke daerah asal, pendampingan klaim BPJS Ketenagakerjaan pada kasus kecelakaan kerja atau kematian, penyediaan shelter sebagai fasilitas transit sementara, dan program pemberdayaan PMI purna berupa pelatihan keterampilan seperti membuat makanan ringan dan membuka usaha kecil.

Implementasi PERLEVA bersifat lintas sektor sehingga membutuhkan koordinasi intensif dengan berbagai instansi. UPTP2TK berkoordinasi dengan BP2MI/BP3MI, Disnaker kabupaten/kota, Kementerian Luar Negeri, KBRI/KJRI, Dinas Sosial, rumah sakit, aparat keamanan, NGO, dan perusahaan penempatan (P3MI). Koordinasi dilakukan melalui rapat berkala, grup komunikasi TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), serta zoom meeting khusus untuk kasus deportasi guna memastikan akurasi data penerima. Regulasi memberikan pijakan formal yang kuat bagi koordinasi tersebut. Bu Nurul menegaskan “regulasi dari kegiatan kita adalah UU No. 18 Tahun 2017, turunannya adalah Perda No. 2 Tahun 2022 apabila ada suatu kejadian masalah terhadap PMI, kami bisa handle dari kantor cabang ataupun kantor pusat yang ada di wilayah Jawa Timur.” Pak Prayit menambahkan "Ada grup TPPO untuk evaluasi agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab."

Namun koordinasi lintas instansi tidak selalu berjalan mulus. Bu Nurul mengungkapkan sejumlah kendala “PT sulit dipanggil, kendalanya waktu dan komunikasi. Ketidaksiapan administrasi dari luar negeri sehingga surat dari luar negeri sering mendadak.” Fenomena ini sejalan dengan analisis Winter tentang *multi-actor implementation* yang oleh O'Toole (1986) dikategorikan sebagai bentuk implementasi paling rumit karena mengandung interdependensi tinggi antar lembaga.

Pelaksana PERLEVA menunjukkan kapasitas teknis yang memadai dalam menangani berbagai jenis kasus PMI. Seluruh narasumber internal menegaskan

bahwa staf memahami alur kerja dan delapan SOP yang berlaku. Bu Nurul menyatakan: "Setiap kegiatan wajib mempunyai SOP ada 8 SOP dan semuanya berjalan efektif." Staf mampu menangani kasus mulai dari pengaduan, mediasi, pemulangan, pengurusan jenazah, hingga klaim jaminan sosial yang membutuhkan pemahaman hukum ketenagakerjaan dan migrasi internasional sekaligus. Komitmen pelaksana menjadi modal paling menonjol dalam implementasi PERLEVA. Layanan bersifat 24 jam tanpa mengenal hari libur. Bu Defrina menyatakan: "Komitmen kita tinggi karena pelayanan itu 24 jam sehingga kita tidak mengenal libur." Pak Prayit mengonfirmasi hal serupa: "Untuk beban kerja cukup tinggi karena harus bekerja tanpa melihat jam masuk maupun jam pulang." Tingginya komitmen ini sebagian berhasil mengompensasi keterbatasan struktural yang ada.

Keterbatasan SDM menjadi hambatan yang konsisten disampaikan seluruh narasumber internal. Bu Nurul menjelaskan: "Untuk SDM kita masih kurang, karena semakin bertambahnya waktu SDM yang pensiun dengan yang masuk lebih banyak yang pensiun." Pak Prayit menambahkan: "Untuk tugas yang ada di PERLEVA ini jumlah aparaturnya masih kurang sehingga masih membutuhkan pegawai atau staf yang di luar PERLEVA." Kondisi ini memaksa sebagian staf bekerja melampaui kapasitas normalnya, terutama saat terjadi penanganan kasus jenazah atau deportasi secara mendadak. Kesenjangan pelatihan juga menjadi persoalan tersendiri. Bu Defrina menyebutkan bahwa ASN lebih banyak mendapat pelatihan dibandingkan non-ASN. Akibatnya sebagian staf mengandalkan *learning by doing* atau pembelajaran berbasis pengalaman. Winter menyebut fenomena ini sebagai *street-level interpretation*, yakni ketika pelaksana menafsirkan kebijakan berdasarkan pengalaman personal karena keterbatasan pelatihan formal.

Respons kelompok sasaran terhadap layanan PERLEVA secara umum positif. Bu Wiwin Sukaningsih, keluarga PMI yang memanfaatkan layanan pemulangan jenazah, memberikan penilaian yang tinggi: "Pelayanan cukup tertata dan sangat dibutuhkan... petugas cepat dan responsif." Terkait kemudahan memahami prosedur, ia menambahkan: "Saya yang sudah tua begini... waktu dijelaskan langsung mengerti." Hal ini menunjukkan kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan prosedur teknis menjadi informasi yang ramah bagi masyarakat awam. Mayoritas PMI yang ditangani UPTP2TK berasal dari latar belakang pendidikan rendah (SD–SMP) dan kondisi ekonomi lemah. Bu Defrina menegaskan kondisi ini mendorong PMI bekerja di sektor domestik dan informal yang rentan eksploitasi. Winter menekankan bahwa semakin rentan kelompok sasaran, semakin tinggi intensitas interaksi yang harus dilakukan pelaksana dan semakin kompleks respons implementasi yang dibutuhkan.

Kendala dari sisi kelompok sasaran muncul ketika keluarga PMI tidak memahami prosedur administrasi pemulangan jenazah atau klaim jaminan sosial. Bu Nurul mengungkapkan: "Komunikasi dengan keluarganya yang di desa yang susah karena kebanyakan tidak paham akan prosedur pemulangan." Variasi kemampuan administratif ini memperlambat penanganan kasus dan menambah beban kerja pelaksana. Meski begitu, masyarakat juga berperan aktif sebagai pelapor awal yang menjadi pintu masuk penanganan kasus. Faktor pendukung implementasi PERLEVA meliputi kerangka regulasi yang kuat dan jelas sebagai

dasar legitimasi pelaksanaan program, komitmen pelaksana yang tinggi, tercermin dari kesiapsiagaan melayani 24 jam termasuk pada hari libur, ketersediaan sarana yang memadai berupa tiga unit ambulans, shelter transit, kendaraan operasional, dan counter PMI di Bandara Juanda, respons positif kelompok sasaran yang mendukung kelancaran proses layanan, serta mekanisme koordinasi lintas instansi melalui grup TPPO dan evaluasi berkala yang mencegah tumpang tindih kewenangan.

Faktor penghambat meliputi, keterbatasan jumlah SDM pada Seksi PERLEVA yang tidak sebanding dengan volume kasus yang terus meningkat, diperparah oleh tren pensiun yang tidak diimbangi rekrutmen baru, kesenjangan pelatihan antara ASN dan non-ASN sehingga sebagian staf bergantung pada pengalaman lapangan, keterbatasan anggaran untuk kasus darurat seperti pengeluaran jenazah dari kargo bandara atau pemulangan PMI sakit yang datang mendadak, koordinasi yang tidak selalu berjalan optimal akibat perbedaan prioritas antar instansi dan sulitnya memanggil P3M, serta variasi kemampuan administratif keluarga PMI yang memperlambat proses pelayanan, terutama pada kasus pemulangan jenazah dan klaim BPJS.

#### **D. PENUTUP**

Implementasi Program PERLEVA di UPTP2TK Jawa Timur berjalan cukup efektif sebagai wujud nyata perlindungan PMI bermasalah di tingkat daerah. Keefektifan tersebut merupakan hasil interaksi kompleks antara tiga dimensi dalam Model Winter (2012), yaitu konteks kebijakan yang kuat secara regulatif, kapasitas dan komitmen pelaksana yang tinggi, serta respons positif dari kelompok sasaran. Dari aspek hubungan antar organisasi, UPTP2TK membangun jejaring koordinasi lintas instansi yang cukup ekstensif dengan BP2MI/BP3MI, Disnaker kabupaten/kota, KBRI/KJRI, Dinas Sosial, rumah sakit, NGO, dan instansi daerah. Koordinasi melalui grup TPPO dan zoom meeting evaluasi menunjukkan komitmen pencegahan tumpang tindih kewenangan, meskipun tantangan berupa perbedaan prioritas instansi dan keterlambatan surat dari luar negeri masih kerap terjadi. Dari aspek perilaku birokrasi garis depan, pelaksana PERLEVA memiliki kompetensi teknis yang memadai, memahami delapan SOP yang berlaku, dan menunjukkan komitmen luar biasa dengan bersedia melayani 24 jam tanpa mengenal hari libur.

Namun keterbatasan jumlah SDM, kesenjangan pelatihan antara ASN dan non-ASN, serta keterbatasan anggaran untuk kasus darurat menjadi hambatan struktural yang perlu segera diatasi. Dari aspek perilaku kelompok sasaran, PMI dan keluarganya memberikan respons positif terhadap layanan yang dinilai responsif, mudah dipahami, dan tidak berbelit. Variasi kemampuan administrasi keluarga PMI yang umumnya berasal dari latar belakang pendidikan rendah menjadi tantangan yang menuntut pendampingan lebih intensif dari pelaksana. Penelitian ini merekomendasikan penambahan jumlah SDM pada Seksi PERLEVA secara proporsional, pemerataan pelatihan teknis bagi seluruh staf termasuk non-ASN, penyederhanaan materi informasi publik agar mudah dipahami keluarga PMI, penguatan digitalisasi layanan untuk mempercepat koordinasi lintas instansi, serta pembenahan mekanisme pendanaan layanan darurat agar penanganan kasus mendadak tidak terhambat keterbatasan anggaran.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Azkiya, M. E. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 21 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja di Luar Negeri. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 12(1), 1–15.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Apriliano, J. (2022). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik di desa lise*.
- Ardiana, P., & Nafi'ah, B. A. (2025). Efektivitas Pelayanan LTSA–PMI (Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia) di UPT P2TK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 397–407.
- Bajri, H. K., & Akim, A. (2021). Faktor Domestik Yang Memengaruhi Kebijakan Luar Negeri Iran Terhadap Arab Saudi Pascaeksekusi Mati Nimr Al-Nimr. *Jurnal ICMES*, 5(1), 108–124.
- Birkland, T. A. (2019). *An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making*. Routledge.
- Bungin, B., & Moleong, L. J. A. (2007). Jenis dan Pendekatan Penelitian. *Proses Kerja Kbl Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility Di PT. Pelindo, 1*.
- Data, A. (2014). Teknik pengumpulan data. *Jurnal Pendidikan Mipa Susunan Redaksi*, 4.
- Dye, T. R. (1992). Understanding public policy. (No Title).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Febriani, S. E. (n.d.). *FAKTOR-FAKTOR PENDORONG DAN KENDALA TENAGA KERJA UNTUK BEKERJA KE LUAR NEGERI*.
- Gunawan, D. A. F., & Nafi'ah, B. A. (2025). Effectiveness of Facilitation Services for Repatriation of Indonesian Migrant Workers at Technical Implementation Unit of Labor and Transmigration Office in East Java Province. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 23(1), 282–290.
- Hafiszah, L., & Yusran, R. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN INDEKS PERTANAMAN (IP) PADI DI KABUPATEN TANAH DATAR. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(11), 3709–3726.
- Hill, M., & Hupe, P. (2021). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance*.
- Izzati, N. R. (2019). New Direction of Indonesian Migrant Workers Protection through the Law Number 18 of 2017 and its Implementation Challenges. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 6(1), 190–210.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal*

- Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Kunarti, S., Afwa, U., & Hartini, S. (2023). Strengthening Migrant CARE: A Comprehensive Approach to Ensure Worker Protection and Safeguard the Rights of Indonesian Migrants. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1454–e1454.
- Malau, N. A., Kurniawan, A., Kusmendar, K., Widayati, T., Rozikin, I., Safii, M., Abdullah, F., Sulaiman, S., & Adhania, L. S. O. (2024). *Kebijakan Publik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Mediana, C. (n.d.). *Porsi Pekerja Migran secara Global Terus Meningkat*. Kompas.Com. <https://www.kompas.id/artikel/cenderung-naik-tren-porsi-pekerja-migran-terhadap-angkatan-kerja-global>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Muadi, S., Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224.
- Nabilah, M. (2025). *Mayoritas Pekerja Migran Kuartal I 2025 Berasal dari Pulau Jawa*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/6809bfed210ff/mayoritas-pekerja-migran-kuartal-i-2025-berasal-dari-pulau-jawa>
- Nugraha, R., Budiati, A., & Nugroho, K. S. (2024). Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Struktural Eselon IV ke Jabatan Fungsional di Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang. *Syntax Idea*, 6(1), 416–435.
- Prasiwi, S. D., Mursyidah, L., & Sutanto, S. H. (2024). Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Usaha Mikro dan Kecil Topi di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo). *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 18(1), 59–73.
- Putri, G. E., Mabruhi, K. A. K., & El Rahman, V. (2025). Implementation of Protection for Indonesian Migrant Workers in Malaysia in 2022-2023. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 10(1), 23–36.
- Raco, J. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*.
- Rani, D. A. P. (2019). *Dampak Implementasi Layanan Inovasi Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (SIMPADU-PMI) di UPT P2TK Provinsi Jawa Timur*. UPN Veteran Jatim.
- Sagara, R., Setiawan, A. H., & Purnawan, E. (2025). Dinamika Kependudukan dan Ketenagakerjaan: Tantangan dan Kebijakan Berkelanjutan untuk Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(1), 317–329.
- Salsabila, A. K., & Nawangsari, E. R. (2019). Inovasi Pelayanan Simpadu-Pmi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan. *Public Administration Journal of Research*, 1(2), 164–180.
- Sanjaya, I. K. A. (2025). UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA NONPROSEDURAL DI LUAR NEGERI. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 11(1), 164–178.

- Sasmita, A. N., & Rahaju, T. (2023). Implementasi Open Parliament Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Publika*, 1723–1734.
- Setiawati, B., & Kasmad, R. (2018). Implementasi Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) Di Kabupaten Gowa. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 4(3), 352–365.
- Setyawan, A., Hsu, H.-C., Chiou, S.-J., Wu, W.-C., Chuang, K.-Y., & Chuang, Y.-C. (2025). Satisfaction with healthcare services and related factors among Indonesian migrant workers in Taiwan: a cross-sectional survey study. *BMC Health Services Research*, 25(1), 582.
- Sudaryanto, A. P., & Hanny, S. (2023). Manajemen sumber daya manusia sektor publik menghadapi kemajuan kecerdasan buatan (artificial intelligence). *Musamus Journal of Public Administration*, 6(1), 513–521.
- Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan R&D. *Bandung: Alfabeta*, 33.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110–116.
- Suwandono, T. A. (2023). Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kota Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7(1), 283–289.
- Triprastiwi, A. S., & Niswah, F. (2020). Penerapan Electronic Government melalui Aplikasi Simpadu-PMI di UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. *Publika*, 8(3).
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Vancoppenolle, D., Sætren, H., & Hupe, P. (2015). The politics of policy design and implementation: A comparative study of two Belgian service voucher programs. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 17(2), 157–173.
- Widodo, U. (2025). *Tingkat Pengangguran Indonesia Tertinggi se-Asia Tenggara*. Kompas.Com.  
[https://www.kompasiana.com/uripwido/6815dc0234777c72f36a6532/tingkat-pengangguran-indonesia-tertinggi-se-asia-tenggara?page=1&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/uripwido/6815dc0234777c72f36a6532/tingkat-pengangguran-indonesia-tertinggi-se-asia-tenggara?page=1&page_images=1)
- Winter, S. C. (2012). Implementation perspectives: Status and reconsideration. *The SAGE Handbook of Public Administration*, 265–278.
- Yuliyanti, E., Susanti, E. Y. E., & Geasill, L. Y. J. (2025). DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN DI NEGARA BERKEMBANG: ANALISIS LITERATUR TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 5(2), 238–246.